

**PUDARNYA HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN NEGARA DALAM
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SAAT INI
(Studi Kasus di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin,
Kabupaten Serdang Bedagai)**

Aditya Pramana Putra Ginting¹, Nayla Aira Dharma Putri², Cheisya Salsabila³, Zakila Zahara⁴, Putri Ramadhani⁵, Nikmah Azahra⁶, Salwa Amir Hsb⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}UIN Sumatera Utara

Email: adityaprahmana28@gmail.com¹, naylaairadharmap@gmail.com²,
salsabilacs07@gmail.com³, zakilazahara@gmail.com⁴, putriramadhani3370@gmail.com⁵,
nikmahazhara5@gmail.com⁶, shulhanhasibuan@gmail.com⁷

Abstrak

Hubungan antara agama dan negara merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan sosial dan perubahan zaman, hubungan tersebut dinilai mulai mengalami pergeseran dalam praktik kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pudarnya hubungan antara agama dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 44 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai peran agama dan negara serta keterkaitan keduanya. Kehidupan keagamaan di desa tersebut dinilai masih berjalan cukup baik, meskipun terdapat indikasi berkurangnya peran nilai agama dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama dalam pelibatan tokoh agama pada kebijakan desa dan minat generasi muda terhadap kegiatan keagamaan. Faktor modernisasi, perkembangan teknologi, dan kesibukan masyarakat menjadi penyebab utama kondisi tersebut. Meskipun demikian, masyarakat berharap adanya penguatan kembali peran agama melalui kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh agama.

Kata Kunci: Agama dan Negara, Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Nilai Keagamaan, Masyarakat Desa, Perubahan Sosial.

Abstract

The relationship between religion and the state is an important aspect of national and civic life in Indonesia. However, along with social development and changing times, this relationship is considered to have experienced a shift in its practical application within society. This study aims to examine the extent to which the relationship between religion and the state has faded in the life of the community of Tebing Tinggi Village, Tanjung Beringin District, Serdang Bedagai Regency. This research uses a descriptive approach with data collected through questionnaires distributed to 44 respondents. The results show that the community still has a fairly good understanding of the importance of the roles of religion and the state and their

interrelationship. Religious life in the village is generally still well maintained; however, there are indications of a declining role of religious values in several aspects of social and civic life, particularly in the involvement of religious leaders in village policy-making and the younger generation's interest in religious activities. Factors such as modernization, technological development, and community busyness contribute to this condition. Nevertheless, the community expresses positive attitudes and hopes for strengthening the role of religion through better cooperation between the village government and religious leaders.

Keywords: Religion and State, National and Civic Life, Religious Values, Village Community, Social Change.

PENDAHULUAN

Hubungan antara agama dan negara merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian politik dan sosial, relasi antara agama dan negara tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif yang bersifat teoritis, melainkan juga sebagai realitas sosial yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai belahan dunia, hubungan ini dipahami melalui beragam pendekatan, mulai dari model pemisahan yang tegas antara agama dan negara hingga model relasi yang menempatkan keduanya dalam posisi saling mendukung dan melengkapi dalam ruang publik.¹

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara agama dan negara memiliki

karakteristik yang khas dan berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan komitmen negara dalam mengakui serta menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa menjadikan agama tertentu sebagai dasar penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara sekuler murni maupun negara agama, melainkan sebagai negara yang menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.² Dalam praktik kenegaraan dan kehidupan sosial, nilai-nilai agama diharapkan tercermin dalam sikap, perilaku, serta kebijakan publik yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan.³

¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

² Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

³ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), *Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat*, Jakarta: BPIP, 2020.

Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika sosial yang ditandai oleh modernisasi, globalisasi, serta pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru terhadap implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perubahan pola pikir masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, serta meningkatnya intensitas penggunaan media sosial, turut memengaruhi cara masyarakat memahami dan memaknai peran agama dalam ruang publik. Kondisi tersebut menyebabkan nilai-nilai agama kerap kali dipahami secara simbolik, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari.⁴

Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Desa Tebing Tinggi terdiri atas enam dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 5.318 jiwa, yang terdiri dari 2.439 laki-laki dan 2.879 perempuan. Secara sosial-ekonomi, mayoritas penduduk Desa Tebing Tinggi bermata pencaharian sebagai petani (55%) dan buruh nelayan (42%), sementara 3% lainnya bekerja sebagai

wirausaha. Secara geografis, Desa Tebing Tinggi berbatasan langsung dengan Desa Pekan Tanjung Beringin, Desa Bagan Kuala, Mangga Dua, Nagur, Pematang Cermai, Pematang Terang, dan Sukajadi. Selain itu, Desa Tebing Tinggi merupakan desa dengan luas wilayah terbesar di Kecamatan Tanjung Beringin, yaitu sekitar 15,17 km² atau setara dengan 1.517 hektar, yang mencakup sekitar 20,4% dari total luas wilayah Kecamatan Tanjung Beringin yang mencapai kurang lebih 74,17 km².

Dalam konteks masyarakat Desa Tebing Tinggi, kehidupan keagamaan secara umum masih berlangsung dengan cukup baik melalui berbagai aktivitas sosial dan keagamaan yang dijalankan oleh masyarakat. Meskipun demikian, fenomena yang berkembang menunjukkan adanya indikasi penurunan peran nilai-nilai agama dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terlihat dari keterlibatan tokoh agama yang belum optimal dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, serta menurunnya minat sebagian generasi muda terhadap kegiatan keagamaan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya

⁴ M. Syaifulloh, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia," Jurnal

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 23, No. 2, 2019.

potensi pergeseran hubungan antara agama dan negara pada tataran lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menggambarkan secara lebih mendalam sejauh mana hubungan antara agama dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dirasakan oleh masyarakat Desa Tebing Tinggi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual yang terjadi di masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak dalam upaya memperkuat kembali peran nilai-nilai agama sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif kondisi hubungan antara agama dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat Desa Tebing Tinggi. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai

fenomena sosial sebagaimana yang dialami dan dirasakan langsung oleh masyarakat di lokasi penelitian.⁶

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Desa Tebing Tinggi. Kuesioner dipilih sebagai instrumen penelitian karena dinilai efektif dalam menjaring data primer secara langsung dari responden, khususnya yang berkaitan dengan pandangan, sikap, serta persepsi masyarakat terhadap hubungan agama dan negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 44 orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa responden merupakan warga yang berdomisili di Desa Tebing Tinggi dan bersedia memberikan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁷

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala Likert. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan jawaban responden

⁵ Zainal Abidin, "Dinamika Hubungan Agama dan Negara dalam Masyarakat Lokal," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14, No. 1, 2020.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

berdasarkan kategori jawaban, menghitung frekuensi dan persentase dari setiap jawaban, serta menginterpretasikan hasilnya untuk mengetahui kecenderungan pandangan masyarakat terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan untuk memaparkan sekaligus menganalisis data penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Desa Tebing Tinggi mengenai hubungan antara agama dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah menggunakan pendekatan deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel persentase agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan, sikap, serta persepsi masyarakat terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, temuan penelitian tersebut dianalisis dan dibahas secara sistematis dengan mengaitkannya pada kerangka teori dan konsep yang relevan, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai kondisi aktual

hubungan agama dan negara di tingkat masyarakat desa.

Tabel 1. Peran Nilai Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Jumlah	Jawaban	Persentase
27	Sangat Setuju	61,36%
15	Setuju	34,09%
0	Ragu-ragu	0%
1	Tidak Setuju	2,27%
1	Sangat Tidak Setuju	2,27%
44	Total	100%

Berdasarkan data pada tabel 1 tersebut, mayoritas responden menyatakan sangat setuju sebanyak 27 orang (61,36%) dan setuju sebanyak 15 orang (34,09%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat persetujuan yang sangat tinggi terhadap pernyataan yang diajukan. Tidak terdapat responden yang memilih ragu-ragu (0%), sementara hanya sebagian kecil responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju, masing-masing sebanyak 1 orang (2,27%). Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum responden memiliki pandangan yang kuat dan positif terhadap isu yang diteliti, dengan tingkat penolakan yang sangat minimal.

Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa agama tidak hanya dipahami sebagai urusan privat atau

⁸ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

sebatas praktik ibadah individual, melainkan sebagai sumber nilai yang membimbing sikap, perilaku, dan interaksi sosial masyarakat. Nilai-nilai agama diyakini mampu membentuk moralitas, etika, rasa tanggung jawab, serta kepedulian sosial yang menjadi dasar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis.⁹

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pengakuan terhadap peran nilai agama ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat solidaritas sosial, menjaga keharmonisan antarwarga, serta menumbuhkan sikap saling menghormati di tengah keberagaman. Dengan demikian, agama masih diposisikan sebagai elemen penting yang menopang kehidupan sosial dan kebangsaan masyarakat Desa Tebing Tinggi.

Tabel 2. Hubungan Agama dan Negara Saling Mendukung

Jumlah	Jawaban	Persentase
28	Sangat Setuju	63,64%
13	Setuju	29,55%
2	Ragu-ragu	4,55%
0	Tidak Setuju	0%
1	Sangat Tidak Setuju	2,27%
44	Total	100%

Berdasarkan data pada Tabel 2, sebagian besar responden menyatakan sangat setuju sebanyak 28 orang (63,64%) dan setuju sebanyak 13 orang (29,55%). Hal

ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kecenderungan sikap yang positif terhadap pernyataan yang diajukan. Meskipun demikian, terdapat 2 responden (4,55%) yang memilih ragu-ragu, yang mengindikasikan adanya sebagian kecil responden yang belum memiliki sikap yang sepenuhnya pasti. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju (0%), sementara hanya 1 responden (2,27%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi dengan penolakan yang sangat minimal..

Pandangan tersebut sejalan dengan karakteristik hubungan agama dan negara di Indonesia, di mana negara berperan menjamin kebebasan beragama serta menciptakan ruang bagi berkembangnya kehidupan keagamaan, sementara agama memberikan landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan kehidupan publik.¹⁰ Hubungan ini dipahami bukan sebagai hubungan yang saling mendominasi, melainkan sebagai hubungan yang bersifat saling melengkapi.

⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2016.

¹⁰ Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Dengan demikian, masyarakat Desa Tebing Tinggi cenderung menerima dan mendukung model relasi agama dan negara yang harmonis dan seimbang. Model hubungan ini dipandang mampu menjaga stabilitas sosial serta mendorong terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai moral dan kemanusiaan.

Tabel 3. Kondisi Kehidupan Keagamaan di Desa Tebing Tinggi

Jumlah	Jawaban	Persentase
12	Sangat Setuju	27,27%
20	Setuju	45,45%
9	Ragu-ragu	20,45%
0	Tidak Setuju	0%
3	Sangat Tidak Setuju	6,82%
44	Total	100%

Berdasarkan data pada Tabel 3, responden paling banyak menyatakan setuju sebanyak 20 orang (45,45%), diikuti oleh responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang (27,27%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung memberikan persetujuan terhadap pernyataan yang diajukan, meskipun tingkat persetujuannya tidak sekuat pada tabel sebelumnya. Selain itu, terdapat 9 responden (20,45%) yang memilih ragu-ragu, yang mengindikasikan adanya keraguan atau ketidakpastian pada

sebagian responden terhadap isu yang diteliti. Sementara itu, tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju (0%), namun terdapat 3 responden (6,82%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun persetujuan masih mendominasi, terdapat variasi sikap responden yang lebih beragam dibandingkan tabel sebelumnya. Meskipun demikian, adanya respon ragu-ragu menunjukkan bahwa kualitas kehidupan keagamaan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan tingkat partisipasi, pemahaman, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keagamaan dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap kondisi kehidupan keagamaan di lingkungan desa.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan dalam sosiologi agama yang menyatakan bahwa keberlangsungan dan kualitas kehidupan keagamaan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat.¹¹ Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin kuat pula peran agama dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis.

¹¹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Tabel 4. Pengaruh Tokoh Agama dalam Kehidupan Masyarakat Desa

Jumlah	Jawaban	Persentase
18	Sangat Setuju	40,91%
19	Setuju	43,18%
4	Ragu-ragu	9,09%
2	Tidak Setuju	4,55%
1	Sangat Tidak Setuju	2,27%
44	Total	100%

Berdasarkan data pada Tabel 4, responden yang menyatakan setuju sebanyak 19 orang (43,18%) dan sangat setuju sebanyak 18 orang (40,91%) merupakan mayoritas dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap positif terhadap pernyataan yang diajukan. Meskipun demikian, terdapat 4 responden (9,09%) yang memilih ragu-ragu, yang mengindikasikan adanya sebagian kecil responden yang belum sepenuhnya memiliki sikap yang pasti. Selain itu, terdapat 2 responden (4,55%) yang menyatakan tidak setuju dan 1 responden (2,27%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, hasil ini memperlihatkan bahwa tingkat persetujuan responden tetap tinggi, meskipun mulai muncul variasi pandangan dalam jumlah yang relatif kecil. Namun demikian, adanya jawaban ragu-ragu mengindikasikan mulai munculnya pergeseran peran tokoh agama di

tengah masyarakat. Perubahan pola kehidupan, perkembangan pendidikan, serta pengaruh modernisasi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan keterikatan masyarakat terhadap otoritas tokoh agama.

Fenomena ini sejalan dengan kajian yang menyebutkan bahwa modernisasi dan perubahan sosial berpotensi menggeser otoritas tradisional, termasuk peran tokoh agama.¹² Meski demikian, tokoh agama tetap memiliki posisi penting sebagai penjaga nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 5. Penurunan Peran Nilai Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat

Jumlah	Jawaban	Persentase
7	Sangat Setuju	15,91%
20	Setuju	45,45%
10	Ragu-ragu	22,73%
4	Tidak Setuju	9,09%
3	Sangat Tidak Setuju	6,82%
44	Total	100%

Berdasarkan data pada Tabel 5, responden paling banyak menyatakan setuju sebanyak 20 orang (45,45%), diikuti oleh responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang (15,91%). Namun demikian, terdapat 10 responden (22,73%) yang memilih ragu-ragu, yang menunjukkan adanya tingkat keraguan

¹² Azyumardi Azra, *Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 2017.

yang cukup signifikan di kalangan responden terhadap pernyataan yang diajukan. Selain itu, terdapat 4 responden (9,09%) yang menyatakan tidak setuju dan 3 responden (6,82%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun persetujuan masih mendominasi, tingkat keraguan dan penolakan responden pada tabel ini relatif lebih tinggi dibandingkan tabel-tabel sebelumnya. Sebagian responden mulai merasakan adanya kecenderungan berkurangnya pengaruh nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sementara responden lainnya masih menilai bahwa nilai agama tetap memiliki posisi yang kuat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang sedang berlangsung di tengah masyarakat.

Fenomena tersebut mencerminkan proses perubahan sosial yang terjadi secara bertahap.¹³ Perubahan nilai tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti modernisasi, pendidikan, dan perkembangan teknologi.

Tabel 6. Pelibatan Tokoh Agama dalam Kebijakan Desa

Jumlah	Jawaban	Persentase
7	Sangat Setuju	15,91%

15	Setuju	34,09%
9	Ragu-ragu	20,45%
10	Tidak Setuju	22,73%
3	Sangat Tidak Setuju	6,82%
44	Total	100%

Berdasarkan data pada Tabel 6, responden paling banyak menyatakan setuju sebanyak 15 orang (34,09%), diikuti oleh responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 9 orang (20,45%) dan sangat setuju sebanyak 7 orang (15,91%). Di sisi lain, terdapat 10 responden (22,73%) yang menyatakan tidak setuju serta 3 responden (6,82%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat persetujuan responden pada tabel ini relatif lebih rendah dibandingkan tabel-tabel sebelumnya, dengan proporsi ketidaksetujuan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, data pada Tabel 6 mencerminkan adanya perbedaan pandangan yang lebih beragam di kalangan responden terhadap pernyataan yang diajukan. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya keterbatasan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan tokoh agama. Kurangnya pelibatan tokoh agama dalam proses kebijakan dapat memengaruhi

¹³ Burhan Bungin, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Kencana, 2015.

tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Dalam tata kelola pemerintahan lokal, pelibatan tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, memiliki peran strategis dalam memperkuat legitimasi kebijakan dan membangun kepercayaan publik.¹⁴ Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa dan tokoh agama menjadi hal yang penting untuk ditingkatkan.

Tabel 7. Pengaruh Teknologi dan Media Sosial terhadap Nilai Agama

Jumlah	Jawaban	Persentase
15	Sangat Setuju	34,09%
19	Setuju	43,18%
7	Ragu-ragu	15,91%
1	Tidak Setuju	2,27%
2	Sangat Tidak Setuju	4,55%
44	Total	100%

Berdasarkan data pada Tabel 7, mayoritas responden menyatakan setuju sebanyak 19 orang (43,18%), diikuti oleh responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang (34,09%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap yang positif terhadap pernyataan yang diajukan. Selain itu, terdapat 7 responden (15,91%) yang memilih ragu-ragu, yang mengindikasikan masih adanya sebagian responden yang belum memiliki sikap yang sepenuhnya pasti. Sementara itu, hanya 1 responden

(2,27%) yang menyatakan tidak setuju dan 2 responden (4,55%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat persetujuan responden masih mendominasi, dengan tingkat penolakan yang relatif rendah. Perkembangan media sosial membawa perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, serta memahami ajaran keagamaan. Bagi sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, media digital menjadi sumber utama dalam mengakses informasi keagamaan.

Kondisi ini sejalan dengan berbagai kajian yang menyatakan bahwa media digital memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik keberagamaan dan pembentukan pola pikir masyarakat modern.¹⁵ Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi secara bijak menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga nilai-nilai agama.

Tabel 8. Kurangnya Komunikasi antara Pemerintah Desa dan Tokoh Agama

Jumlah	Jawaban	Persentase
8	Sangat Setuju	18,18%
20	Setuju	45,45%
9	Ragu-ragu	20,45%
4	Tidak Setuju	9,09%
3	Sangat Tidak Setuju	6,82%
44	Total	100%

¹⁴ Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000.

¹⁵ Suyanto, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Berdasarkan data pada Tabel 8, responden paling banyak menyatakan setuju sebanyak 20 orang (45,45%), diikuti oleh responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (18,18%). Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan sikap responden masih didominasi oleh persetujuan terhadap pernyataan yang diajukan. Namun demikian, terdapat 9 responden (20,45%) yang memilih ragu-ragu, yang menandakan adanya tingkat keraguan yang cukup terasa di kalangan responden. Selain itu, terdapat 4 responden (9,09%) yang menyatakan tidak setuju dan 3 responden (6,82%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, data pada Tabel 8 memperlihatkan bahwa meskipun persetujuan masih mendominasi, variasi pandangan responden cukup beragam dengan tingkat keraguan dan penolakan yang tidak dapat diabaikan. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan miskomunikasi, perbedaan persepsi, serta berkurangnya keterlibatan tokoh agama dalam kegiatan pemerintahan desa. Kondisi ini berpotensi menghambat terciptanya sinergi antara pemerintah desa dan unsur keagamaan.

Komunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam membangun kerja sama antaraktor sosial di tingkat lokal.¹⁶ Dengan komunikasi yang baik, hubungan antara pemerintah desa dan tokoh agama dapat terjalin lebih harmonis dan produktif.

Tabel 9. Dampak Pudarnya Hubungan Agama dan Negara

Jumlah	Jawaban	Persentase
10	Sangat Setuju	22,73%
23	Setuju	52,27%
7	Ragu-ragu	15,91%
1	Tidak Setuju	2,27%
3	Sangat Tidak Setuju	6,82%
44	Total	100%

Berdasarkan data pada Tabel 9, mayoritas responden menyatakan setuju sebanyak 23 orang (52,27%), diikuti oleh responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (22,73%). Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden memiliki sikap persetujuan yang kuat terhadap pernyataan yang diajukan. Selain itu, terdapat 7 responden (15,91%) yang memilih ragu-ragu, yang mengindikasikan masih adanya sebagian responden yang belum sepenuhnya memiliki keyakinan yang pasti. Sementara itu, hanya 1 responden (2,27%) yang

¹⁶ Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

menyatakan tidak setuju dan 3 responden (6,82%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, hasil pada Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat persetujuan responden tetap mendominasi dengan tingkat penolakan yang relatif rendah. Padahal hubungan tersebut dikhawatirkan dapat melemahkan fungsi nilai agama sebagai pengontrol sosial. Tanpa landasan moral yang kuat, masyarakat berpotensi mengalami penurunan kepedulian sosial dan meningkatnya perilaku menyimpang.

Nilai agama berfungsi sebagai pedoman moral yang menjaga keseimbangan sosial dan ketertiban masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, penguatan kembali hubungan agama dan negara menjadi penting untuk menjaga stabilitas sosial.

Tabel 10. Perlunya Kerja Sama Pemerintah Desa dan Tokoh Agama

Jumlah	Jawaban	Persentase
26	Sangat Setuju	59,09%
13	Setuju	29,55%
1	Ragu-ragu	2,27%
2	Tidak Setuju	4,55%
2	Sangat Tidak Setuju	4,55%
44	Total	100%

Berdasarkan data pada Tabel 10, mayoritas responden menyatakan sangat setuju sebanyak 26 orang (59,09%) dan

setuju sebanyak 13 orang (29,55%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat persetujuan yang sangat tinggi terhadap pernyataan yang diajukan. Selain itu, hanya 1 responden (2,27%) yang memilih ragu-ragu, yang mengindikasikan tingkat keraguan yang sangat rendah. Sementara itu, terdapat 2 responden (4,55%) yang menyatakan tidak setuju dan 2 responden (4,55%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, data pada Tabel 10 memperlihatkan bahwa sikap positif responden sangat dominan dengan tingkat penolakan yang relatif kecil.

Kerja sama tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kembali peran nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di tingkat desa. Melalui kolaborasi yang baik, kebijakan desa diharapkan dapat lebih mencerminkan nilai moral dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh agama dinilai penting untuk menjaga keharmonisan sosial, memperkuat kohesi masyarakat, serta menciptakan kehidupan sosial yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.¹⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai secara umum masih memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya peran agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagian besar responden memandang agama sebagai sumber nilai dan moral yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, serta memperkuat kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai masih dipahami sebagai hubungan yang bersifat saling mendukung dan melengkapi. Kehidupan keagamaan masyarakat dinilai masih berlangsung dengan cukup baik, dan tokoh agama masih memiliki peran dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun

demikian, penelitian ini mengungkap adanya indikasi awal terjadinya pergeseran, terutama terkait berkurangnya keterlibatan tokoh agama dalam proses kebijakan desa serta menurunnya minat sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap kegiatan keagamaan.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial, serta kurang optimalnya komunikasi antara pemerintah desa dan tokoh agama, turut menjadi faktor yang memengaruhi melemahnya peran nilai-nilai agama dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Meskipun demikian, masyarakat menunjukkan kesadaran terhadap dampak dari kondisi tersebut dan memiliki harapan yang kuat agar hubungan antara agama dan negara dapat diperkuat kembali melalui peningkatan kerja sama dan sinergi yang lebih baik di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pudarnya hubungan antara agama dan negara tidak terjadi secara drastis, melainkan berlangsung secara perlahan dan situasional, tercermin dari berkurangnya peran nilai-nilai keagamaan dalam ruang

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 2008.

sosial dan kebijakan publik, sebagaimana dikaji dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai hubungan antara agama dan negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk memperkuat kembali peran nilai-nilai agama dalam ruang publik. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan serta membangun komunikasi yang lebih intensif dengan tokoh agama, terutama dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan desa. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang berkembang di tengah masyarakat.

Selanjutnya, tokoh agama diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya dalam merespons tantangan perubahan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi. Pendekatan keagamaan yang adaptif, inklusif, dan komunikatif, terutama terhadap generasi

muda, menjadi sangat penting agar nilai-nilai agama tidak sekadar dipahami secara simbolik, melainkan mampu terinternalisasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Di sisi lain, masyarakat Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat hubungan antara agama dan negara di tingkat lokal. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan melibatkan jumlah responden yang lebih luas serta menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, seperti wawancara mendalam atau observasi lapangan, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan agama dan negara di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal. (2020). *Dinamika Hubungan Agama dan Negara*

- dalam Masyarakat Lokal. Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1).
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. (2017). *Islam Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2020). *Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Jakarta: BPIP.
- Bungin, Burhan. (2015). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Dwiyanto. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, Bahtiar. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kahmad, Dadang. (2011). *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Madjid, Nurcholish. (2008). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rasyid, Ryaas. (2000). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. (2018). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syaifulloh, M. (2019). *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2).